

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
KELURAHAN WAYDADI KECAMATAN SUKARAME
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

DIAH INTAN PERTIWI

1531040099

Program Studi : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
KELURAHAN WAYDADI KECAMATAN SUKARAME
KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

**Oleh :
DIAH INTAN PERTIWI
NPM. 1531040099**

Program Studi : Pemikiran Politik Islam



**Pembimbing I : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
Pembimbing II : Angga Natalia, M.I.P**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2023 M**

ABSTRAK

Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Oleh:

Diah Intan Pertiwi

Program Keluarga Harapan (PKH) menysasar dua hal, yaitu memberikan bantuan langsung tunai, dan memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Tujuan PKH adalah membantu masyarakat miskin dengan melancarkan bantuan langsung tunai, dan memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan kepada mereka. Oleh karena itu implementasi program PKH di Kelurahan Way Dadi perlu dilakukan penelitian, apakah keberadaan PKH di kelurahan tersebut berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah itu.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kesesuaian pemanfaatan bantuan PKH pendidikan di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKH di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara terhadap penerima bantuan PKH untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan bantuan PKH pendidikan di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat PKH di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode observasi, interview, dan dokumentasi. Tehnik sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan empat orang informan yang terdiri dari satu orang pendamping dan empat orang anggota PKH. Faktor pendukung implementasi program PKH ialah masyarakat yang patuh terhadap aturan program PKH. Selain itu, masyarakat juga mau berpartisipasi dengan mematuhi segala komitmen sebagai peserta PKH. Faktor pendukung lain pelaksanaan program adalah dukungan finansial yang lancar sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses pembayaran atau pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu pendanaan menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam pendanaannya sesuai dengan ketentuan. Dengan anggaran yang cukup, pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup KPM sebagai tujuan program dapat meningkat.

Kata Kunci: *Implementasi PKH, Pemberdayaan, Pendidikan.*

ABSTRACT

*Implementation of the Family Hope Program in Waydadi Village,
Sukarame District, Bandar Lampung City*

By:

Diah Mother Earth

The Family Hope Program (PKH) targets two things, namely providing direct cash assistance, and providing assistance in empowering the poor. PKH's goal is to help the poor by launching direct cash assistance, and providing assistance in empowering them. Therefore the implementation of the PKH program in the Way Dadi Sub-District needs to be researched, whether the existence of PKH in the Kelurahan has succeeded in overcoming the problem of poverty in that area.

This study examines how appropriate the use of PKH educational assistance is in the Way Dadi sub-district, Bandar Lampung City and what factors support and hinder the implementation of PKH in the Way Dadi sub-district, Bandar Lampung City. This research is a qualitative research using interviews with PKH beneficiaries to find out how much PKH assistance is utilized for education in the Way Dadi sub-district, Bandar Lampung City and to find out the supporting and inhibiting factors of PKH in the Way Dadi sub-district, Bandar Lampung City.

Data collection methods used by the author are observation, interview, and documentation methods. The sample technique used was purposive sampling with four informants consisting of one companion and four PKH members. Factors supporting the implementation of the PKH program are people who obey the rules of the PKH program. In addition, the community also wants to participate by complying with all commitments as PKH participants. Another supporting factor for program implementation is smooth financial support so that it can determine the success of the goals. In implementing PKH, the payment or funding process is the most important thing as a determinant of success. Besides that, funding is an important matter so that good management and supervision is needed so that the funding is in accordance with the provisions. With an adequate budget, the implementation of the Family Hope program can run well and in the end the KPM's quality of life as a program goal can increase.

Keywords: *Implementation of PKH, Empowerment, Education.*

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Diah Intan Pertiwi
NPM : 1531040099
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuludin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 21 Juni 2022

Penulis



Diah Intan Pertiwi
NPM. 1531040099



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan di
Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung**

Nama : Diah Intan Pertiwi

NPM : 1531040099

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam
Sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004**

**Angga Natalia, M.I.P
NIP.**

Mengetahui,

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam

**Abdul Qohar, M.Si
NIP. 197103120205011005**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”** disusun oleh **Diah Intan Pertiwi, NPM 1531040099**, program studi **Pemikiran Politik Islam**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di **Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan** pada Hari/Tanggal : **21 Juni 2022, Pukul 10.00-11.30 WIB**. Di Ruang Sidang **Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**.

Tim Penguji

Ketua : **Abdul Qohar, M.Si** (.....)

Sekretaris : **Isti Arini, M. Si.** (.....)

Penguji Utama : **Drs. Effendi, M. Hum.** (.....)

Penguji I : **Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si.** (.....)

Penguji II : **Angga Natalia, M.I.P** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Ahmad Isnaeni, M. A.

NIP. 197403302000031001

MOTTO

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." (QS. Al-Munafiqun: 10).



PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Rabb ku, Allah SWT, Tuhan semesta alam.yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah yang tak terhingga. Sholawat serta salam disampaikan Kepada Tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikut-pengikut-Nya yang kita nantikan syafaat-Nya di hari akhir nanti.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Drs. Jawadi dan Ibu Samirahayu. Terimakasih untuk segala cinta, kasih dan sayang, selalu mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan dan keberhasilan penulis. Semoga Allah membalas semua jasa dan pengorbanan papi, ibu.
2. Kakak-kakak penulis, Heri Agus Setiawan, Herman Yunarko, Indarti Ari Wulandari, serta ipar-iparku Siti Fatonah, Carlis Satriana, M Zairi Asshidiq, terimakasih sudah banyak memotivasi dan mendoakan penulis agar secepatnya menyelesaikan studi ini.
3. Almamaterku tercinta, UIN Raden Intan Lampung yang sangat saya hormati dan banggakan yang akan selalu saya jaga nama baiknya.



RIWAYAT HIDUP

Diah Intan pertiwi lahir di Sudimoro, pada tanggal 09 November 1997, penulis anak keempat dari pasangan Ayahanda Drs. Jawadi dan Ibunda Samirahayu. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Bahrul Ulum Sudimoro pada tahun 2001-2003
2. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sudimoro pada tahun 2003-2009
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Semaka pada tahun 2009-2012
4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Pringsewu pada tahun 2012-2015;
5. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung jurusan Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Bandar Lampung, 21 Juni 2022



Diah Intan Pertiwi
NPM. 1531040099

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan ridho ALLAH SWT, tugas akhir perkuliahan skripsi dengan judul “**Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung**”. ini dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Pemikiran Politik Islam. Keseluruhan penulisan karya ilmiah ini terdapat bantuan dari berbagai pihak dalam hal berupa bimbingan, petunjuk, saran, kritik, informasi, dan pengarahan oleh penulis. Oleh karena itu, melalui pengantar ini peneliti menghanturkan rasa hormat dan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, A., M.Ag., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Isnaini, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Lampung yang turut membantu dalam proses kelancaran skripsi ini.
4. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Angga Natalia, M.I.P. selaku Pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Agustamsyah, M.I.P selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk membimbing selama proses pengajuan judul skripsi.
6. Ibu Isti Arini, M.Si selaku sekretaris sidang munaqosyah dan Bapak Drs. Effendi, M.Hum selaku penguji satu yang telah memberikan kritikan, saran, dan arahan selama sidang

- munaqosyah berlangsung agar penyelesaian skripsi menjadi skripsi yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terkhusus di Prodi Pemikiran Politik Islam.
 8. Seluruh staf dan kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai pada tingkat paling bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberi kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 9. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin atas diperkenankannya penulis meminjam literatur yang dibutuhkan.
 10. Kepala Desa Bapak Helpi Nurdin, S.E, Bapak Budi selaku pendamping PKH, Ibu Juini, Ibu Maysaroh, Ibu Nopriyani, dan Ibu Siti Marya selaku penerima PKH yang ada di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan banyak memberikan bantuan selama mengadakan penelitian.
 11. Sahabat-sahabatku Agustina Pudji Rahayu, Dira Ariani Putri, Ratu Suci Ramdayanah, Rita Ayudita yang sedari semester awal telah bersama-sama dan banyak memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini. Teman sepermainan Veny, Maya terimakasih untuk doa dan harapan kesuksesan bagi penulis. Dan teman-teman Seperjuangan PPI Angkatan 15 kelas C yg sudah mensupport dari awal kuliah. Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun serta perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 21 Juni 2022

Diah Intan Pertiwi
NPM. 153104009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metodologi Penelitian	7
I. Kerangka Pikir.....	11
J. Sistematika Pembahasan	11
K. Tinjauan Pustaka	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi	13
1. Implementasi Kebijakan.....	13
2. Model Implementasi kebijakan	14
3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan.....	15
4. Faktor Pendukung dan Penghambat	15
B. Program Keluarga Harapan.....	16
1. Pengertian PKH	17
2. Tujuan PKH	17
3. Penerima Bantuan PKH	17
4. Kewajiban Penerima PKH	17
5. Landasan PKH	18
6. Dasar Pelaksanaan PKH.....	18

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Way Dadi

1. Sejarah Singkat Kelurahan Way Dadi 19
2. Letak Geografis Kelurahan Way Dadi 19
3. Kependudukan Kelurahan Way Dadi 20
4. Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Way Dadi 21

B. Alur Kerja PKH di Kelurahan Way Dadi

1. Penetapan Sasaran (Targeting) 22
2. Penetapan Lokasi 22
3. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi 22
4. Penyaluran Bantuan 23
5. Pembentukan Kelompok Peserta 24
6. Verifikasi Komitmen 24
7. Pemutakhiran Data 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way Dadi Kecamatan

- Sukarame Kota Bandar Lampung 26
1. Kesesuaian PKH di Kelurahan Way Dadi 27
 2. PKH dalam Bidang Pendidikan 28
 3. Tingkat Keberhasilan PKH di Kelurahan Way Dadi .. 29

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Program keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way dadi Kota Bandar Lampung 32

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 35
- B. Sarani 35

DAFTAR PUSTAKA 36

DAFTAR LAMPIRAN 38

DAFTAR TABEL

a. Tabel 1. Daftar Responden	
b. Tabel 2. Data Sekolah Kelurahan Way Dad	i9
c. Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	19
d. Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	20
e. Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	20
f. Tabel 6. Fasilitas Pendidikan Kelurahan Way Dadi.....	21
g. Tabel 7. Analisis Hasil Penelitian.....	32
h. Tabel 8. Penerima PKH dalam Bidang Pendidikan.....	34



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, maka peneliti akan memberikan penegasan dalam beberapa istilah yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.”**

Implementasi program adalah pelaksanaan suatu acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Implementasi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.¹ Sedangkan menurut Susilo, Implementasi merupakan suatu penerapan *idem* konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai dan sikap. Menurut Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau ada mekanisme suatu sistem, Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.² PKH merupakan salah satu solusi yang dipilih pemerintah untuk mensejahterakan keluarga yang dinilai kurang mampu berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

¹ Syarifuddin Nurdin, Basyiruddin Usman, *Guru profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta Ciputat Pers, 2002) h. 70.

² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Way Dadi adalah kelurahan yang berada di kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan kondisi letak geografis kelurahan Way Dadi yang berada tepat berbatasan dengan wilayah Bandar Lampung maka pada tahun 1982 kelurahan Way Dadi masuk ke dalam wilayah Bandar Lampung. Dengan adanya pengembangan wilayah kodya Bandar Lampung, maka kelurahan Way Dadi menjadi salah satu lingkungan di kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Secara geografis kelurahan Way Dadi terletak pada bagian sebelah Utara dari kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Jarak tempuh kelurahan Way Dadi ke kecamatan ± 4 Km, sedangkan jarak tempuh ke Kodya Bandar Lampung ± 2 Km, dengan batas wilayah Kelurahan sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukarame. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Way Kandis. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kodya Bandar Lampung 4. Sebelah Timur bebatasan dengan kelurahan Harapan Jaya Bandar Lampung.

Luas keseluruhan kelurahan Way Dadi adalah ± 360 Ha, yang terbagi dalam 2 lingkungan. Adapun luas tiap lingkungan adalah sebagai berikut : 1. Lingkungan I ± 25 Ha yang terbagi dalam 2 RW dan 7 RT 2. Lingkungan II seluas ± 45 Ha, yang terbagi dalam 7 Rw dan 32 RT Kondisi geografis kelurahan Way Dadi, ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 500 M, dan topografi adalah dataran rendah. Di kelurahan Way Dadi peruntukan lahan dibagi menjadi : a. Jalan = 2 Km b. Sawah dan ladang = 52 Ha c. Bangunan umum = 2 Ha d. Pemukiman perumahan = 95 Ha e. Pekuburan = Ha Sedangkan penggunaan lahan dibagi menjadi : a. Pasar dewa = 0,5 Ha b. Tanah wakaf = 0,8 Ha c. Tanah kering - Pekarangan = 97 Ha - Perladangan = 25 Ha - Tegalan = 38 Ha. Berdasarkan data tahun 2014 penduduk di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebanyak 8.504 jiwa yang terdiri dari 4.339 laki-laki, dan 4.183 perempuan dengan kepala keluarga sebanyak 2.299 jiwa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kelurahan Way Dadi, kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung menarik untuk diteliti di dalam skripsi ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Kelurahan Way Dadi merupakan kelurahan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) cukup signifikan.
2. Penyebab kemiskinan masyarakat kelurahan Way Dadi adalah rendahnya akses kaum miskin kota terhadap pendidikan kesehatan yang tidak terjangkau oleh RTM di wilayah itu.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan hampir menjadi permasalahan di semua negara, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Di Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang penting dan sangat serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, Seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.³

Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Indonesia berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ini menjadi sekitar 7.5% pada tahun 2015 melalui tiga jafur strategi pembangunan, yaitu Pro-Poor (bertumpu pada Penanggulangan Kemiskinan), Pro-Job (bertumpu pada Penyediaan Lapangan Kerja) dan Pro Growth (bertumpu pada Pertumbuhan Ekonomi) untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, Pemerintah meengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program dalam tiga cluster.⁴

³ Oos M.Anvas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 84

⁴ Mengapa PKH Diperlukan “online”

Pemerintah pada era Presiden Jokowi sendiri dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan terdapat beberapa program kebijakan sosial yang diimplementasikan yakni seperti, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, dsb. Keseluruhan program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, dengan harapan mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya di setiap sektor, untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di negara ini. Mulai dari sektor pendidikan, sektor ketahanan pangan, dan kesehatan, dengan bantuan berupa dana langsung tunai sampai dengan bantuan melalui pemberdayaan masyarakat di desa maupun perkotaan.⁵

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster I yaitu Pro-Poor (bertumpu pada Penanggulangan Kemiskinan) di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.⁶ Dasar hukum PKH adalah Pasal 34 UUD 1945, ayat 1 dan 2 yang berisi : (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2)

⁵Edi Suharto. "Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat". (On-line), tersedia di : http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm (09 januari 2022)

⁶Dirjen Linjamsos, Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). (Padang : Kementerian Sosial RI, 2017), h.1

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Adapun runtutan dasar hukum PKH adalah sebagai berikut:

Pasal 34 UUD 1945
(1-2)



Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun
2018 tentang Program
Keluarga Harapan

Implementasi PKH di Provinsi Lampung dilaksanakan sejak November 2010 pada empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Barat. Sampai saat ini pengembangan PKH telah mencapai 15 Kabupaten/Kota di Lampung meliputi; Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Tulang bawang, Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, Tulang bawang Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pesisir Barat. jumlah penerima PKH Lampung saat ini 220.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁷ Pemberian manfaat program PKH telah mencakup keseluruhan Kabupaten di Provinsi Lampung dengan total penerima bantuan 220.561 KSM pada tahun 2014, termasuk didalamnya Kelurahan Way Dadi, dimana kelurahan tersebut memiliki berbagai jenis mata pencarian yang membuat masyarakatnya disebut miskin. Menurut data kependudukan Kelurahan Way Dadi berdasarkan mata pencaharian paling banyak adalah pedagang, karyawan dan buruh.

⁷Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan (pasal 2 angka 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan)

Di Kelurahan Way Dadi penyebab kemiskinan salah satunya adalah rendahnya akses RTM18 terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak terjangkau oleh RTM.⁸ terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak terjangkau oleh RTM. PKH yang mewajibkan RTM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya PKH di Kelurahan Way Dadi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kesehatan, diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di Kelurahan Way Dadi yang selama menjadi masalah terbesar bagi keluarga miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tutik selaku Pendamping di Kelurahan Way Dadi menyatakan bahwa: “Jauh lebih lanjut PKH pada dasarnya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang berupa bantuan tunai bersyarat, yaitu komitmen kehadiran dalam pendidikan dan kesehatan dalam jangka panjang dan adanya perubahan perilaku, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan”⁹ Islam mengajarkan kita untuk peduli pada orang miskin, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-rum Ayat 38:



فَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan

⁸ Rumah Tangga Miskin

⁹ Tutik Agusrini, Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, 09 januari 2022

Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Q.S Ar-rum :38)

Dalam situasi ini yang terkait adalah Kementerian Sosial, bertanggung jawab atas pekerjaan pemulihan sosial, ekonomi, perlindungan. baik, dan terus miskin membantu para pemimpin negara.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kementerian Sosial bekerja:

- a. Mengembangkan, merancang, dan menerapkan kebijakan dalam praktik di bidang rehabilitasi, kesehatan, sosial, perlindungan, dan layanan bagi masyarakat miskin.
- b. Penetapan model dan bahan untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- c. Buat model dalam pemulihan.
- d. Campuran kerja dan kepemimpinan. Dan memberikan dukungan untuk semua aktivitas yang bertanggung jawab dengan penjangkauan komunitas.
- e. Pengelolaan kekayaan negara adalah tanggung jawab Kementerian Sosial.
- f. Pengawasan penggunaan fungsi dan lingkungan Kementerian Sosial.
- g. Pelaksanaan manajemen instruksional dan pengawasan praktik layanan publik.

Di kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota provinsi lampung kita bisa menjumpai orang-orang miskin yang mencari nafkah dengan menuntuf di jalan, tempat keramaian, lampu lalu lintas, rumah. Ibadah, sekolah atau kuliah dan anak terlantar seperti anak jalanan, juga mudah kita lihat di kota Banda Lampung. Pemerintah kota Bandar Lampung harus mampu menangani anak-anak miskin dan terlantar di Bumi Ruwa Jurai. Namun sebaliknya, anak-anak miskin dan terlantar terus bermunculan, bahkan hampir setiap tahun. Hal ini terlihat dari banyaknya anak yang mengemis di lampu lalu lintas, mengemis, putus sekolah, dan masih banyak lagi lainnya. Ini

semua terjadi, akibat minimnya pengawasan orang tua, masyarakat dan pemerintah Kota Banda Bandar Lampung.

Dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009¹⁰ tentang Organisasi dan Fungsi Kantor Wilayah Lampung secara jelas disebutkan bahwa Pelayanan publik mempunyai peran memimpin dalam urusan pemerintahan dalam kaitannya dengan prinsip demokrasi sebagai supremasi hukum, kepala pengambilan keputusan dan pelayanan. pemerintahan kepada gubernur dan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan tugas-tugas penting di atas, Dinas Sosial melakukan tugas-tugas berikut:

- a. Menetapkan aturan bisnis;
- b. Mengatur pekerjaan pemerintah dan layanan publik dalam kepemimpinan;
- c. Arahan dan pelaksanaan kegiatan pekerjaan sosial;

Labour Service yang merupakan mitra desain instansi pemerintah di bidang desain terkait dengan masalah sosial di kota Bandar Lampung mengambil langkah awal untuk mengurangi peningkatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Arah dan pemanfaatan perannya harus disesuaikan dengan keadaan di Kota Bandar Lampung, untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan pemantauan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, pemanfaatan pengembangan dan penggunaan pendapatan dan sumber daya kesehatan, penggunaan konstruksi informasi kesehatan yang dilindungi, penggunaan perlindungan biaya heroik, pionir dan ulet, serta nilai kerjasama. Membahas peran services tidak lepas dari masalah kemiskinan, kemiskinan merupakan isu penting bagi negara maju seperti Indonesia, dimana perlindungan harus relevan, kreatif, dan stabil. Pengentasan kemiskinan negara dibagi menjadi empat kategori:

¹⁰ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009

- 1) Mempertahankan kebebasan, tujuan pencapaian landasan untuk mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin
- 2) Penanggulangan kemiskinan didasarkan pada dukungan kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan berdasarkan prinsip kohesi sosial. dalam masyarakat. mendukung komunitas.
- 3) Menderita kemampuan mendukung industri mikro, yang bertujuan untuk memberikan pangsa pasar dan memberikan insentif bagi usaha kecil
- 4) Layanan lain yang secara langsung mempengaruhi perekonomian dan kemiskinan.¹¹

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan dan Fungsi Pelayanan Kemanusiaan Bandar Lampung, struktur dan fungsinya telah berubah. Untuk penerapan peraturan daerah, definisi tanggung jawab masing-masing proyek di Dinas Kota Bupati Bandar Lampung dibuat sesuai dengan keputusan Dewan Daerah. II Kota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Penerapan Peraturan Negara Pemerintahan Kota Bandar Lampung Tahap II Tahun 1996 tentang Pembentukan Lembaga dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Publik di area panggung Bandar Lampung.¹²

Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MGDs).¹³ Ada lima komponen MGDs yang secara

¹¹ Assessment, Urban Disposal of Poverty Reduced by KUBE Access, Lampung Public Service, 14 September 2019, H.2

¹² PKH Kelurahan Way Dadi, Observasi 8 Juli 2018

tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesetaraan jender, Pengurangan meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH. Komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan, namun dalam penelitian ini juga membahas mengenai keterampilan kewirausahaan dan Family Development Session (FDS) atau Peningkatan kemampuan keluarga. langka kematian bayi dan balita, dan Pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM/ KSM).

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan kesesuaian penggunaan bantuan PKH di atas maka fokus kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam dalam pemberdayaan masyarakat dan pendidikan anak dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus pada penelitian ini adalah pada pemberian manfaat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat dan pendidikan anak dari keluarga yang kurang mampu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kejadian di atas, maka peneliti ingin mengetahui :

1. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan bantuan PKH pendidikan di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan bantuan PKH pendidikan di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung tepat sasaran atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.
- b. Bagi kelurahan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan dimasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang implementasi, dan dapat menjadi tambahan literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada 5 (lima) peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi :

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*” yang ditulis oleh Slamet Riyadi Universitas Lampung, mengemukakan bahwa PKH yang mengkombinasikan skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian Slamet Riyadi berfokus pada analisis bagaimana program PKH terhadap KSM berhasil dilaksanakan, sementara skripsi ini bertujuan hendak melihat keberhasilan implementasi PKH di kelurahan Way Dadi dengan berfokus pada pelaksanaannya di kalangan pelajar dari keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM).
2. Skripsi yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung*” yang ditulis oleh Triwulandari Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menyoroti tentang Hasil pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan setelah pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) dilakukan.¹⁵ Perbedaannya dengan skripsi ini adalah tema penelitian skripsi karya Triwulandari sangat luas, sementara skripsi saya memiliki tema penelitian yang lebih terfokus melihat keberhasilan implementasi PKH di kelurahan Way Dadi khususnya pada pelaksanaannya di kalangan pelajar dari keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM).

¹⁴ Slamet Riyadi, Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin Penerima Bantuan, Tesis (Lampung: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016). Sumber: digilib.unila.ac.id/22515/3/TESIS_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf diakses pada tanggal 6 Juni 2018.

¹⁵ Triwulandari, Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung. (Lampung: Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

3. Skripsi berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”* yang ditulis oleh Cut Razi Mirsandi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Skripsi ini menyoroti perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Skripsi karya Cut Razu Mirsandi masih terlalu luas berbicara mengenai perlindungan sosial masyarakat. Sementara skripsi ini lebih menumpukan pada keberhasilan implementasi PKH di kelurahan Way Dadi dengan berfokus pada pelaksanaannya di kalangan pelajar dari keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM).
4. Skripsi berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”* ditulis oleh A. Wahdaniah dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini ingin mengetahui pelaksanaan PKH pada masyarakat Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Perbedaannya dengan skripsi saya adalah skripsi ini tidak membahas implementasi pelaksanaan PKH pada masa Covid-19 dan lebih berfokus pada keberhasilan implementasi PKH di kelurahan Way Dadi dengan berfokus pada pelaksanaannya di kalangan pelajar dari keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM).
5. Skripsi berjudul *“Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari”* karya Jauna dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1) bagaimana peran pemerintah desa terhadap Program Keluarga harapan (PKH), (2) dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan, (3) faktor-faktor

penghambat yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi. Perbedaannya dengan penelitian skripsi saya adalah jika skripsi di atas berujuan melihat peran pemerintah desa Teluk Batanghari dalam menyukkseskan program PKH di wilayahnya maka skripsi saya bertujuan melihat keberhasilan implementasi PKH di kelurahan Way Dadi dengan berfokus pada pelaksanaannya di kalangan pelajar dari keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM).

Penelitian di atas menjelaskan bahwa diberlakukannya PKH pada setiap wilayah memiliki pengaruh yang berbeda-beda, Begitu pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkaji Implementasi PKH yang ada di Kelurahan Way Dadi serta tinjauannya dalam perspektif Pemberdayaan Masyarakat, tentu penelitian ini akan menghasilkan output berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.¹⁶ Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan data dan penafsiran fakta-fakta.¹⁷ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan nantinya dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanc

¹⁶ Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi, (Malang: Rineka Cipta, 2005) h.16

¹⁷ Cholid Norobuko,Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1997) h.1

kehidupan sebenarnya.¹⁸ Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan (field research) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga tau organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.²¹ Dengan demikian, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupaya menghimpun data, mengolah data dan menganalisa data secara kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang program kemiskinan dan pemberdayaan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti dalam mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung, Peneliti interaksi face to face dengan Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, dan juga interaksi dengan para anggota PKH di Kelurahan Way Dadi. Dari kriteria di atas, penulis

¹⁸ Cholid Norobuko, Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997) h.1 23

¹⁹ Sutrisno Hadi, Metode Research, (yogyakarta: fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142

²⁰ Lexsi.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya 2001) Cet. Ke-15 h.3

²¹ Rosady Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal.215

menetapkan penerima PKH tahap I di Kelurahan Way Dadi, dan menetapkan 6 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pendamping PKH, dan 5 (lima) orang anggota yang aktif dalam kegiatan PKH Waydadi.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pertama dan data kedua.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.²² Proses yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari informasi mengenai responden terkait peran dan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan dalam skripsi peneliti yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara lapangan.

Tabel 1. Daftar Responden

No.	Nama Anak	Nama Ibu	Sekolah
1	Aldo Nanda Prasetio	Siti Marya	Kelas 10 SMAN 12 Bandar Lampung
2	Irtiqfa Aljaulana	Nopriyani	Kelas 9 SMPN 21 Bandar Lampung
3	Raisa	Juni	Kelas 1 SDN 1 Way Dadi
4	Depriansyah	Maisaroh	Kelas 10 SMAN 12 Bandar Lampung

²²Abdurrahman Fathoni, Teknik Riset dan Perencanaan Strategis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 38

b. Data Sekunder

File kedua adalah data-data yang dengan demikian paling sering dibuat dalam bentuk data, misalnya data kependudukan daerah dan sebagainya.²³Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder juga mencakup jumlah sekolah di kelurahan Way Dadi.

Tabel 2. Mekanisme Penyaluran PKH

1. Pembukaan Rekening KPM	2. Sosialisasi dan Edukasi	3. Distribusi KKS dan Butab	4. Penyaluran Bantuan Sosial PKH	5. Penarikan dan Pemanfaatan Dana Bansos PKH	6. Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bansos PKH	7. Pemantauan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan rekening secara kolektif (<i>Bulk Account Opening</i>) 2. Cetak (persa) Kartu 3. Produksi PIN 4. Laporan hasil proses <i>Bulk Account Opening</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Edukasi Bansos non tunai kepada Pemda dan SDM PKH 2. Sosialisasi dan Edukasi Bansos Non Tunai PKH kepada Pemda, SDM PKH, Agen dan KPM oleh Bank Penyalur dan Kemensos. (<i>KPM baru</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi KKS, Butab dan PIN dari KP ke KC 2. Distribusi KKS, Butab dan PIN dari KC kepada KPM 3. Berita Acara serah terima KKS dan Butab kepada KPM. 4. Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening dan surat pernyataan persetujuan atau kuasa untuk memberikan informasi nomor rekening dan data pribadi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya 2. Pengajuan dana ke KPFN 3. Pembuatan Surat Perintah pemindahbukuan / <i>Standing Instruction</i> (SI) ke Bank Penyalur Pusat 4. Pelaksanaan pemindahbukuan / <i>Standing Instruction</i> (SI) 5. Laporan hasil pemindahbukuan yang gagal dan sukses transfer sebagaimana dimaksud poin no.2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan penarikan dana bansos PKH 2. Penarikan Dana oleh KPM 3. Pelaporan KPM yang transaksi dan tidak transaksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, ke tingkat pusat 2. Rekonsiliasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota a. Provinsi, dan tingkat pusat berkoordinasi dengan Bank Penyalur 3. Berita Acara hasil rekonsiliasi Kab/Kota dan Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan periodik realisasi bansos setiap tahap penyaluran 2. Laporan KKS Tidak Distribusi dan KPM Tidak Transaksi setiap tahap penyaluran 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH 4. Analisa kecenderungan penyaluran bansos 5. Analisa kecenderungan pengaduan terkait penyaluran bansos berdasarkan

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan Metode observasi adalah sebuah metode penelitian yang terencana dan dilakukan dengan secara sistematis pada keadaan

²³Ibid., Abdurrahman Fathoni, hal. 40

ataupun seluruh fenomena social dengan gejala-gejalanya yang mempengaruhi segala aspek, termasuk aspek psikis.²⁴ Jenis observasi yang digunakan peneliti bersifat non partisipan, artinya peneliti tidak terlibat dengan beberapa kegiatan sehari-hari terhadap subjek yang diamati namun peneliti mencari informasi yang berhubungan langsung dan sudah terjadi secara nyata dilapangan yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi peneliti.²⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah dengan tujuan tertentu. Wawancara adalah jenis pertanyaan yang diajukan responden kepada responden.²⁶ Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas yaitu tanya jawab langsung dimana dalam wawancara tersebut pewawancara membawa pertanyaan wawancara yang hanya jika ada detail dari apa yang ditanyakan. Wawancara (interview) dilakukan dengan Human Services Kota Bandar Lampung. Model-model tersebut menjadi kunci untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar informasi yang diperoleh akurat sesuai dengan skripsi peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh informasi adalah proses memperoleh informasi sebagaimana adanya dan menggali informasi dari berbagai jenis atau perubahannya berupa surat, catatan, buku, buletin, artikel, buletin, foto, rapat, dan kutipan.²⁷ Informasi yang dimaksud disini berkaitan dengan data yang diperoleh dari penelitian untuk memperjelas atau mengklarifikasi fakta tertentu, yang merupakan bentuk

²⁴ Suharsimi arikunto, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek* (Jakarta : Rineka Cipta 1989), h. 80.

²⁵ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 66

²⁶ *Ibid.*, Sanapiah Faisal, hal. 133

²⁷ Sutrisno Hadi, *Riset Sistematis, Volume II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal. 233

catatan tertulis terkait penelitian tersebut.

4. Metode Analisis Data

Prosedur pengolahan data adalah struktur atau prosedur yang digunakan untuk menyusun data, baik data esensial maupun sekunder, untuk memaksimalkan manfaat pengumpulan data dapat menggunakan tahapan berikut ini:²⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Informasi yang diterima di lokasi kelurahan way dadi kecamatan sukarama kota Bandar Lampung. Peneliti kemudian mendokumentasikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program PKH. Laporan dibuat dengan sesuai yang terjadi dilapangan yang berupa informasi, dokumentasi dan hasil analisis dari berbagai sumber termasuk hasil wawancara yang dikombinasikan dengan teori yang peneliti pakai dalam penulisan skripsi ini. Hasil pada reduksi data ini menjelaskan kesesuaian implementasi program bantuan PKH dan menjabarkan faktor pendukung dan penghambat selama program PKH dilaksanakan.

2. Penyajian Data

Keterbukaan Informasi merupakan upaya untuk merekam teks yang diterima sebagai tanggapan, setelah itu informasi disajikan dengan jelas dan efisien sehingga dapat dengan mudah dibuat untuk menarik kesimpulan.

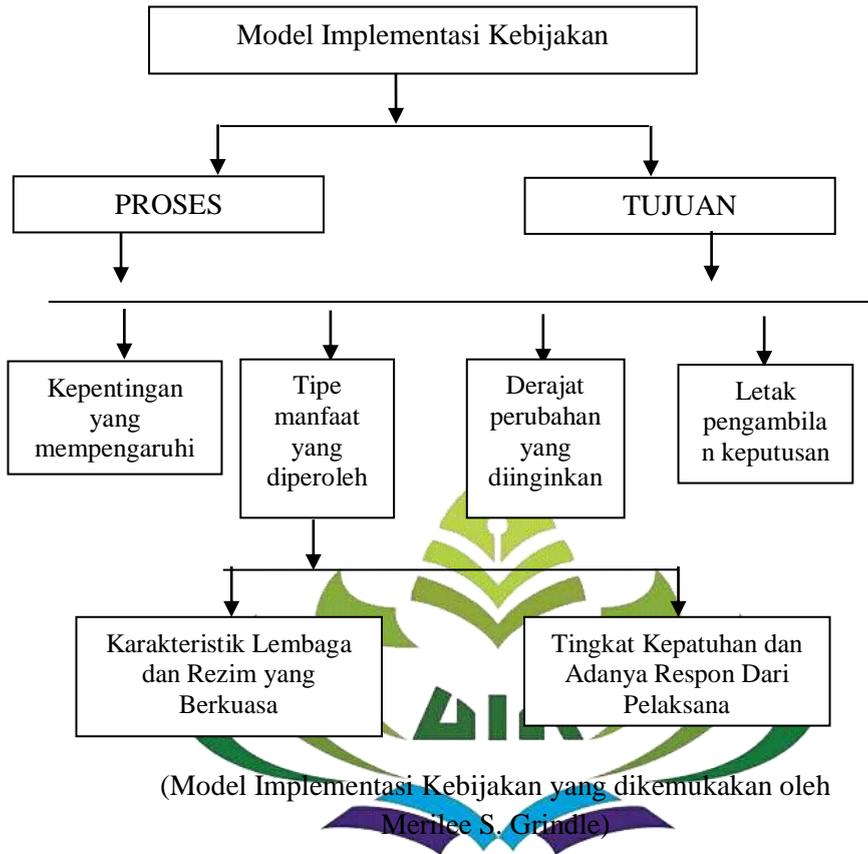
3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Untuk menarik kesimpulan peneliti menggunakan analisis pendekatan induktif. Adapun analisis

²⁸ Mill dan Huberman dalam Bugin (2004: 99)

induktif yaitu cara menganalisa data dengan mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.

I. Kerangka Pikir



J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan; halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar,

halam daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada Bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada Bab kedua atau landasan teori dan kajian teori memuat uraian tentang pengertian implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung.

Pada Bab ketiga merupakan bab metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian menggunakan, teknik pengelolaan dan analisis dalam pengumpulan data dan sumber data.

Pada Bab keempat membahas tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Way dadi Kota Bandar Lampung.

Pada Bab kelima terakhir yaitu penutup, yang akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.

K. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan temuan yang membahas masalah yang sama oleh satu orang, baik dalam buku atau genre lain, peneliti menyajikan bukti mengenai kalimat 34 ayat 1 (1) dari UUD 1945 yang mengatur tentang anak-anak miskin dan terlantar yang dipelihara oleh negara. Sedangkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan merupakan peraturan menteri sosial yang mengatur mengenai pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/ atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin sesuai amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁹ Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.³⁰

Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.³¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan aringan pelaksana birokrasi yang efektif.³² Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

²⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70

³⁰ Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21.

³¹ E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56

³² 9 Guntur Setiawan, Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan menurut karakternya

adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan.

Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Menurut Grindle (dalam Leo Agustino, 2014:154-157) keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang

ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan.

- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy (dalam Leo Agustino, 2014:154-156):

1. Content of Policy menurut Grindle adalah:

- a) Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

- b) Type of Benefits (tipe manfaat)

Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c) Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d) Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan

keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- e) Program Implementer (pelaksana program)
Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f) Resources Committed (sumber-sumberdaya yang digunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy menurut Grindle adalah:

- a) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b) Institution dan Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya.
- c) Compliance and Responsivisness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Sejuahmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang

tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti lebih tertarik untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari Grindle, Merilec S, yang menjelaskan makna implementasi kebijakan sebagai berikut. “implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan public yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “policy delivery system” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian outcome-nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program.”

4. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara

moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negaranegara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang banyak dan bernilai tinggi. Karenanya penjajah melakukan penjajahan di banyak Negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya.³³

Konsep tanggung jawab bersama, pentingnya demokrasi sebagai pengendali negara, dan nilai kehidupan manusia telah berkurangsejak era 1990-an. Kesehatan dan pendidikan sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah dirubah menjadi kancah kepentingan anggaran dan penguasa. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan social, persamaan, demokrasi, kepentingan masyarakat, dan keadilan ditempatkan pada posisi yang terendah.³⁴

Pemerintah Indonesia sejatinya telah merencanakan cukup banyak program. Semenjak orde reformasi dimulai, telah terjadi beberapa kali pergiliran pemerintahan mencakup Presiden, Wakil Presiden, juga DPR/MPR. Masingmasing pemerintahan pun memiliki program-program positif masing-

³³ <https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomipembangunan/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan> diakses tanggal 10 Januari 2022

³⁴ Indra Bastian. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.(Erlangga:Jakarta, 2005), 6

masing. Program tersebut berusaha menopang kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, serta ekonomi yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan. Salah satu program yang digalakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah PKH (Program Keluarga Harapan). Program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial ini fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

1. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.³⁵

2. Tujuan PKH

Adapun tujuan PKH pada umumnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari PKH adalah: a. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. c.

³⁵ <https://www.kemsos.go.id/modules> , Mari Kita Menenal Program PKH. Sumber wacana: Dwi Heru Sukoco diakses tanggal 10 januari 2022

Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.³⁶

3. **Penerima Bantuan**

Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0- 15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

4. **Kewajiban Penerima**

Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penerima PKH, baik pada bidang kesehatan maupun pada bidang pendidikan. Bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh para penerima, maka pendamping PKH berhak mengeluarkan sanksi. Adapun hak peserta PKH antara lain³⁷ :

1. Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan.
2. Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Pusat kesehatan masyarakat, Posko pelayanan terpadu, Pondok bersalin desa)M
3. endapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan.

5. **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar PKH antara lain:³⁸

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

³⁶ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 10 januari 2022

³⁷ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal Januari 2022

³⁸ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 10 januari 2022

2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

6. Dasar Pelaksanaan PKH

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
3. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
4. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
5. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.³⁹

Dalam pelaksanaan PKH, penyerahan dana bantuan ini dilakukan oleh pendamping PKH. Pendamping

³⁹ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 10 januari 2022

merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Way Dadi

1. Sejarah Singkat Kelurahan Way Dadi

Pada awalnya Kelurahan Way Dadi sudah terbentuk sejak tahun 1965 yang diberi nama Sukarame Way Dadi karena kepala Desa nya terlibat organisasi terlarang sehingga susunan Way Dadi kembali lagi menginduk ke Desa Sukarame 1. Terbentuknya Kelurahan Way Dadi merupakan pemekaran dari Kelurahan Sukarame 1 yang dulu dikenal dengan lingkungan IV dan V Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. Berdasarkan perda No. 04 tahun 2001 tentang penghapusan pembentukan dan penggabungan Kecamatan serta Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka terbentuklah Kelurahan Way Dadi dengan pusat Administrasi Pemerintahannya berkedudukan di jalan Pulau Tegal No.1 dan hasil pemberian tanah hibag dari masyarakat di bangun dari Bantuan APBD Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 492 hektar yang jadi 3 lingkungan. Pada tanggal 17 September 2012 Kelurahan Way Dadi terjadi pemekaran, sehingga luas wilayah menjadi 187 hektar dan ditetapkan menjadi dan ditetapkan menjadi 2 lingkungan berdasarkan perda no tahun tentang penghapusan pembentukan penggabungan Kecamatan serta Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung.

2. Letak Geografis Kelurahan Way Dadi

Secara geografis kelurahan Way Dadi terletak pada bagian sebelah Utara dari kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Jarak tempuh kelurahan Way Dadi ke kecamatan \pm 4 Km, sedangkan jarak tempuh ke Kota Bandar Lampung \pm 12 Km, dengan batas wilayah Kelurahan sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukarame 2. Sebelah Selatan

berbatasan dengan kelurahan Way Kandis. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kodya Bandar Lampung 4.

Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Harapan Jaya Bandar Lampung. Secara geografis Kelurahan Way Dadi merupakan daerah dataran rendah dengan sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk pemukiman atau perumahan. Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat seperti sarana peribadatan berupa masjid, musholla, SD, SMP, dan SMA. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Puskesmas dan Posyandu.

3. Kependudukan Kelurahan Waydadi

a. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No.	Lingkungan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lingkungan I	2.738	1.859	3.598
2.	Lingkungan II	1.797	1.714	3.511
	Jumlah	3.535	3.574	7.109

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Way dadi pada tahun 2018 berjumlah 7.109 jiwa yang terdiri dari Penduduk Perempuan 3.574 jiwa, dan Penduduk laki-laki berjumlah 3.535.

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS	226	212	438
TNI	31	1	32
PEDAGANG	523	392	915
TANI	40	15	55
TUKANG	89	0	89
BURUH	506	139	645
PENSIUNAN	147	77	244
KARYAWAN	413	401	814
Lain-Lain	1560	2337	3897
Jumlah	3535	3574	7109

Dari Tabel di atas diketahui bahwa, Mata pencarian paling banyak adalah Pedagang, Buruh dan lain lain. Mata pencaharian lain lain adalah penduduk Kelurahan Way Dadi memiliki pekerjaan harian lepas yang angka pendapatan ekonomi perbulannya masih belum stabil atau berubah-ubah sehingga, Penduduk di Kelurahan Way Dadi yang pendapatannya belum tetap disebut miskin, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Golongan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana	427	424	851
Sarjana Muda	213	267	480
SLTA	1725	1675	3400
SLTP	481	499	980
SD	448	477	925
Taman Kanak-Kanak	125	124	249
Belum Sekolah	116	108	224
Buta Huruf	0	0	0
Jumlah	3535	3574	7109

Sumber data dokumentasi Kelurahan Way Dadi

Pada tabel di atas diketahui bahwa Pendidikan paling banyak ditempuh penduduk Kelurahan Way Dadi adalah tamat SLTA sebanyak 3400 dan SLTP sebanyak 980 dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Way Dadi masih belum melaksanakan wajib belajar 12 hingga tamat SLTA.

4. Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Way Dadi

Tingkat pendidikan di Kelurahan Way Dadi dipengaruhi dengan adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Berikut ini adalah prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung, yaitu :

Tabel 6. Fasilitas Pendidikan Kelurahan Way dadi

No.	Nama Tingkat Pendidikn	Alamat
1.	PAUD a. PAUD Seruni b. PAUD At-tamam c. PAUD Pertiwi	Jl. Pulau Seribu LK 2 RT 1 Jl. Pembangunan H LK 1 RT 7 Jl. Pembangunan A6 LK 1 RT 5
2.	Taman Kanak-Kanak a. TK Novaliawijaya b. TK At-tamam c. TK Pertiwi d. TK PGRI e. TK Pertiwi Asih f. TK Imanuel	Jl. Pulau Tegal JL. Pembangunan G RT 7 LK I JL. Pembangunan A6 RT 5 LK I JL. P Pandan No.33 RT 7 LK I JL. P Pandan RT 8 LK II JL. Soekarno Hatta RT 1 LK II
3.	Sekolah Dasar (SD) a. SD N 1 Way Dadi	Jl. Pulau Pandan
4	SMP a. SMP PGRI	JL. P Pandan No 2 RT 7 LK II

	b. SMP 57	JL. Jambu RT 4 LK II
5	SMA/SMK a. SMK BLK b. SMK 57 c. SMK PGRI	JL. Sentot Alibasya JL. Jambu RT 4 LK II JL. P Pandan No 2 RT 7 LK II

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa prasarana penunjang pendidikan di Kelurahan Way Dadi cukup baik untuk menunjang pendidikan masyarakat sampai ke jenjang SMA. Berdasarkan Data PKH Kabupaten Kelurahan Way Dadi tahun 2011, terdapat 1 unit satuan sekolah pada tingkat SD/ sederajat dan 2 unit sekolah tingkat SMP/ sederajat serta 3 unit sekolah tingkat SMA/SMK yang menjadi tempat belajar bagi siswa-siswa peserta PKH di Kelurahan Way Dadi. Jumlah siswa PKH pada tingkat SD dan SMP yang sedang menempuh pendidikan berjumlah 43 siswa.

B. Alur Kerja PKH di Kelurahan Way Dadi

PKH Way Dadi dalam prosesnya memiliki beberapa prosedur Alur kerja PKH terdiri atas lima kegiatan utama yaitu:

1. Penetapan Sasaran (Targeting)

Pendamping PKH Way Dadi menetapkan sasaran dalam rangka perluasan jangkauan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sumber data awal kepesertaan PKH berasal dari pendataan program perlindungan sosial yang diperoleh dari Basis Data Terpadu TNP2K melalui Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Dari populasi yang telah ditetapkan ada 4 KPM yang telah ditentukan dan memiliki Struktur data kepesertaan memiliki salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut

- a. Ibu Siti Marya memiliki 2 orang anak yang menempuh pendidikan pada bangku SD dan SMA, maka ibu Siti Marya berhak menjadi sasaran PKH Way Dadi.
- b. Ibu Nopriyani memiliki 3 orang anak yang masih balita, SD dan SMP yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, maka ibu Nopriyani berhak menjadi sasaran PKH Way Dadi
- c. Ibu Juini memiliki 2 orang anak berusia yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, maka ibu Juini berhak menjadi sasaran PKH Way Dadi.
- d. Ibu Maisaroh seorang janda, mengurus ibunya yang sudah lansia dan memiliki 1 orang anak menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas. Maka ibu Maisaroh berhak menjadi sasaran PKH Way Dadi.

2. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi kabupaten/kota berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksana PKH melalui surat keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan sosial RI.

- a. Membentuk Tim kordinasi PKH di kabupaten/kota.
- b. Menyediakan kantor sekertariat dan fasilitas pendukung di UPPKH kabupaten/kota.
- c. Menyediakan kantor sekertariat UPPKH Kecamatan
- d. Melakukan Sosialisasi kepada tim kabupaten/kota, kepada aparat pemerintah di level kecamatan dan kelurahan, kepada masyarakat.

3. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi

Setelah penetapan sasaran selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta PKH Way Dadi. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan pendamping yaitu bapak budi tentang program kepada calon peserta PKH Way Dadi. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta PKH Way Dadi.

Tujuan validasi calon peserta PKH dalam rangka memperoleh peserta PKH Way Dadi, yang akan benar benar menjadi anggota tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Marya salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa: “Sewaktu pertemuan rutin hampir sebagian dari peserta mengerti dan memahami tujuan PKH dan pengalokasian sesungguhnya dana PKH, karena mengikuti kegiatan rutin pertemuan peningkatan kemampuan keluarga setiap bulannya sehingga penyampaian informasi yang disampaikan pendamping efektif. Serta penentuan peserta penerima bantuan yang tepat sasaran”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa dalam pertemuan rutin KPM belum menyadari bahwa pentingnya program ini untuk perubahan sosial ekonominya kedepan. dengan diadakannya sosialisasi diharapkan akan membantu KPM mengerti tentang informasi melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. PKH Way dadi mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali yaitu awal bulan, yang dihadiri KPM dan Pendamping dengan lokasi pertemuan yang telah ditetapkan KPM. Kegiatan dalam penyusunan perencanaan pertemuan awal PKH, pendamping memberikan pengarahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan misalnya kegiatan Family Development Session. Yang akan dilaksanakan dengan memberikan modul pembelajaran dengan cara andragogi.

4. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH Way Dadi berdasarkan komponen kepesertaan PKH. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan empat tahap, melalui sistem rekening. Penyaluran Bantuan adalah penyaluran dana bantuan PKH yang disalurkan dari Rekening Pemberi Bantuan Sosial ke Rekening Penerima

⁴⁰ Siti Marya, Peserta PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, tanggal 09 januari 2022

Bantuan Sosial. Pencairan dana PKH Way Dadi dilakukan di ATM BRI atau BANK BRI. Pada tahun 2018 sudah dialihkan ke BANK BRI, KPM telah menerima Kartu Keluarga Sejahtera yang fungsinya sama dengan ATM pada umumnya. KPM dapat mengambil uang bantuin sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan, dengan instruksi Pendamping. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juini salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa:

“Tahun 2018 ini penerimaan dana PKH tidak lagi melalui kantor POS seperti yang sudah dijalankan selama ini, pencairan dana PKH akan dialihkan melalui ATM, dan dana bantuan yang diterima tidak sepenuhnya diberikan dalam bentuk uang seperti yang telah lalu namun akan diberikan setengah dari dana yang diterima berbentuk uang dan setengahnya diberikan dalam bentuk barang yang bisa di dapatkan di E-warong yang telah ditunjuk 55 oleh pemerintah. Tentu hal ini membuat kekhawatiran para peserta karna sangat rumit. Hal ini terjadi karena latar Belakang masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah dan gagal teknologi”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa Adanya peraturan baru yaitu peralihan pencairan dana yang semula di ambil melalui kantor POS kini beralih ke ATM, hal ini meresahkan KPM hal ini dikarenakan latar Belakang masyarakat yang kurang akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ada beberapa KPM yang menyalah gunakan dana tunai yang diberikan PKH. Kondisi tersebut yang dialami oleh ibu Baitati, juga dilakukan oleh ibu Siti Marya Dana tersebut digunakan jika kondisi orang Kepala Keluarga saat tidak bekerja atau menganggur. Sehingga dana tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari- hari keluarga, berikut kutipan wawancaranya: “ Pencairan uangnya di ATM, untuk uangnya selain pakai kebutuhan anak anak juga pakai

⁴¹ Juini, Peserta PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, tanggal 10 Januari 2022

kebutuhan keluarga kalau bapaknya anak-anak usaha dagangnya lagi gak lancar terpaksa saya pakai uangnya untuk kebutuhan keluarga dulu.⁴²

Adapun dana yang digunakan oleh Peserta PKH tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya yang diharuskan dalam program tersebut, tetapi digunakan pula untuk kebutuhan lain diluar ketentuan. Dana tersebut kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan bsehari-hari orang tua, jika mereka terdesak saat tidak bekerja.

5. Pembentukan Kelompok Peserta

Setelah penyaluran bantuan pertama dilaksanakan, UPPKH Kecamatan Sukarame memfasilitasi pertemuan kelompok peserta PKH Way Dadi. Setiap 15-25 KPM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kab/Kota untuk setiap kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan Keluarga, dan sebagainya. PKH Way Dadi telah melakukan pembagian kelompok yang dipimpin oleh bapak budi dengan ketua kelompok Ibu Susni, Wakil Ibu Parmi, Bendahara Ibu Rosiah dan Sekretaris Ibu Purwaningsih setiap anggota memiliki tugas masing masing.

6. Verifikasi Komitmen

Komitmen peserta PKH Way Dadi pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (enrollment) dan kehadiran (attendance) anak baik disekolah untuk komponen pendidikan maupun pukesmas untuk komponen kesehatan. Verifikasi dilaksanakan setiap bulan secara rutin oleh petugas pelayanan kesehatan menggunakan formulir verifikasi yang telah disediakan oleh program dan hasil verifikasi menjadi dasar pembayaran bantuan yang diterima peserta PKH. Verifikasi untuk pembayaran

⁴² Siti Marya, Pesera PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, 10 januari 2022

tahap awal dilakukan dengan menerbitkan daftar anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas yang terdaftar di Puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal peserta PKH. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak budi Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, menyatakan bahwa

”Pendampingan KPM harus dipantau, mulai dari segi pendidikan anak peserta PKH sampai dengan ke Posyandu juga harus dipantau setiap bulannya berdasarkan petunjuk dasar dan petunjuk teknis pendampingan PKH, jika tidak memenuhi komitmen kehadiran sebanyak 85%, maka peserta akan dikenakan sanksi berupa pengurangan bantuan.”⁴³

Selanjutnya dalam bidang Pendidikan kepada mereka diwajibkan untuk melakukan pemanfaatan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam pemberdayaan PKH di Kelurahan Way Dadi terdapat dua komponen yang menjadi fokus dalam program ini yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam fasilitas pendidikan adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak, bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, khususnya SD, SMP dan SMA serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nopriyani salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa:

”Di bidang pendidikan dana yang kami dapat dari PKH kami gunakan untuk keperluan sekolah dan transportasi anak untuk pergi kesekolah. Jadi dana PKH membantu kami agar anak kami tetap bisa sekolah, Anak dari peserta PKH juga lebih diutamakan jika ada beasiswa dari sekolah.”⁴⁴

Untuk mencapai tujuan ini, Program Keluarga Harapan dalam bidang pendidikan, mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar.

⁴³ Budi, Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, 10 januari 2022

⁴⁴ Nopriyani, Peserta PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, tanggal 10 januari 2022

Dengan pendidikan diharapkan akan mencapai generasi berkelanjutan. Pemberdayaan PKH di Kelurahan Way Dadi juga memberikan kreatifitas kepada pendamping agar anggotanya menjadi mandiri dengan mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Usaha Ekonomi Produktif, dan kegiatan bermanfaat lainnya dimana pada setiap pertemuan bulanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak budi selaku Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan adalah kegiatan keterampilan kewirausahaan, agar nanti KPM setelah mengikuti kegiatan pendampingan ini dapat memiliki keterampilan usaha untuk menambah nilai ekonomi, yang tidak hanya mengandalkan dana dari PKH saja. Ada juga kegiatan FDS yang nantinya akan membantu KPM mengatur keuangan dengan model yang telah diberikan.”⁴⁵

Pendamping memberikan penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan pada anggotanya melalui orang yang lebih professional dibidangnya. Contohnya mengelola limbah bekas menjadi kerajinan tangan dan pembuatan saus sambal kemasan. Pendamping mengundang pemateri dari luar yang lebih profesional untuk memberikan keterampilan kewirausahaan, setelah KPM tidak menjadi anggota PKH lagi, diharapkan KPM telah memiliki bekal untuk menambah nilai lebih dalam bidang ekonomi. PKH di Kelurahan Way Dadi telah memiliki E-Warung KUBe PKH (Elektronik warung). E-warung merupakan warung yang berisi produk pokok rumah tangga, dan hasil dari kegiatan kewirausahaan yang diadakan pada pertemuan bulanan, saat ini E-Warung berisi produk-produk hasil olahan KPM.⁴⁶

⁴⁵ Budi, Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, tanggal 10 januari 2022

⁴⁶ PKH Kelurahan Way Dadi, Observasi, tanggal 10 januari 2022

Masyarakat yang mengikiti keterampilan usaha, mempunyai alasan mendasar mengapa mengikuti kegiatan keterampilan usaha ini adalah untuk menambah penghasilan keluarga, meningkatkan keterampilan, serta mengisi waktu senggang ketika tidak ada pekerjaan. Pengembangan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dengan melibatkan perempuan mempunyai kelebihan tersendiri, karena perempuan yang telah berstatus sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan mengurus rumah, anak serta keluarganya. Hal ini dimaksudkan bahwa ibu rumah tangga pun bisa menjadi pelaku usaha, tidak hanya bapakbapak saja tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maisaroh selaku anggota PKH Kelurahan Way Dadi, menyatakan bahwa:

“Sebelum mengikuti pelatihan ini saya dirumah tidak mempunyai pekerjaan sampingan, hanya sebagai ibu rumah tangga saja, menganggur, ketika mengikuti pelatihan keterampilan usaha ini saya bisa membuat limbah bekas menjadi kerajinan tangan yang menarik dan pembuatan saus sambal kemasan, tanpa harus menyampingkan urusan rumah tangga. Jadi kalo lagi nganggur dirumah saya sekarang ada kegiatan yang lebih bermanfaat.”⁴⁷

Namun, Adapun hasil produk dari KPM ini yang telah selesai tidak adanya akses dalam pemasaran, sehingga KPM mengalami kesulitan memasarkan produknya. Untuk saat ini Pendamping membantu memasarkan produk saat ada nya bazar bazar usaha, dan memasarkannya di E-Warong untuk memamerkan hasil produksi KPM. Pendamping berusaha sebisa mungkin membantu pemasaran Produk,

⁴⁷ Maisaroh, Peserta PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, 10 Januari 2022

agar PKH tidak dikenal hanya penerima dana bantuan tunai saja yang diterima, namun usaha ekonomi kreatif pun dilakukan saat melakukan pendampingan.

PKH memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan keluarga yang diberikan oleh petugas pendamping dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), terutama pada kelompok keluarga sangat miskin. FDS merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan. Kegiatan FDS ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran memang seringkali berlangsung lambat, tetapi perubahan yang terjadi akan bertahan lama. Kegiatan pemberdayaan melalui proses pembelajaran dilihat dari seberapa jauh dialog, diskusi atau pertukaran pengalaman yang terjadi antara fasilitator dan penerima manfaat. Pendamping terkait kegiatan FDS dan terbagi dalam modul bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan keluarga.⁴⁸

7. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan peserta PKH Way Dadi sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada master database. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut :

1. Perubahan tempat tinggal
2. Kelahiran anggota keluarga
3. Penarikan anak-anak dari program kematian
4. Keluar/pindah sekolah, dan sebagainya
5. Masuknya anak-anak baru ke sekolah, Ibu hamil
6. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen
7. Perubahan nama ibu/perempuan penerima

⁴⁸ PKH Kelurahan Way Dadi, Observasi, tanggal 10 Januari 2022

8. PKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili)
9. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
10. Perubahan variabel sinergitas program

Apabila data KPM mengalami perubahan maka pendamping akan membantu mengubah dan mencatat perubahan informasi yang terbaru.





BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bahwasannya PKH tersebut datang dari pusat yang di kelola oleh tiap-tiap kelurahan yaitu di kelurahan Waydadi Kota Bandar Lampung. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh panitia atau operator PKH kepada peneliti bahwa Data awal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dikirim ke pusat, pusat kemudian menyaring data setelah itu baru dikirim ke Kementerian Sosial. Selanjutnya baru dikembalikan ke daerah masing-masing. Karena pendamping PKH bukan yang memilih masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut tetapi tugas pendamping atau panitia atau operator PKH hanya untuk mendampingi data yang sudah ada. Tahapan pelaksanaan program keluarga harapan dari hasil wawancara dengan pihak pendamping PKH bapak budi, mengatakan bahwa “pertama kami menerima data dari pusat, setelah itu kami koordinasi dengan pihak kecamatan atau camat kemudian koordinasi bersama stakeholder atau keuchik selanjutnya baru kita buat pertemuan awal untuk memvalidasi data, mengentri data ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan terakhir final closing, baru setelah selesai itu semua masuklah tahap penyalurann dana kepada Keluarga Penerima Mamfaat (KPM).”⁴⁹

Dana PKH yang diberikan untuk tujuan membantu dalam pendidikan dan kesehatan anak tersebut tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan yang seharusnya, jadi dalam menjalankan strategi PKH Kepala Dinas Sosial, mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan koordinator PKH

⁴⁹ Budi, Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, tanggal 10 januari 2022

Kabupaten dan sebelum turun kelapangan Kadis terlebih dahulu mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) ke Camat juga Kades dengan menyatakan bahwa ini benar pendamping PKH, tanpa sepengetahuan Kadis pihak pendamping tidak bisa turun sembarangan kelokasi karena mereka dibawah pengawasan Kadis.⁵⁰ Dalam pelaksanaan pengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) dibutuhkan manajemen pemerintah yang efektif untuk mencapai tujuan dari program keluarga harapan.⁵¹

1. Kesesuaian Penerimaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Way Dadi

PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi. Program Keluarga Harapan dalam bidang pendidikan, mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar. Dengan pendidikan diharapkan akan mencapai generasi berkelanjutan. Pemberdayaan PKH di Kelurahan Way Dadi juga memberikan kreatifitas kepada pendamping agar anggotanya menjadi mandiri dengan mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau

⁵⁰ Budi, Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, tanggal 10 januari 2022

⁵¹ Bellone. Carl J. 2001. "Organization Theory and The New Public Administration". Allyn and Bacon. Inc. Jakarta : Gramedia.h.19-20

seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dana PKH yang diberikan untuk tujuan membantu dalam pendidikan dan kesehatan anak tersebut tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan. Dalam pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan teori dimana adanya stimulus respon antara Keluarga Penerima Manfaat dan Program. Stimulus yang dimaksud ialah kegiatan yang dilakukan oleh PKH Way Dadi seperti kunjungan ke pelayanan kesehatan, partisipasi anak kesekolah, pemberian pelatihan kewirausahaan dan kegiatan *Family Development Seassion*, dimana pendamping memberikan stimulant kepada KPM.

Sedangkan respon dari stimulus tersebut ialah KPM semangat, antusias dalam mengikuti kehadiran dan pelatihan kewirausahaan, semangat KPM dalam menyekolahkan anak dan kunjungan ke pelayanan kesehatan. Penyaluran bantuan PKH dilaksanakan empat kali penyaluran dalam satu tahun. Khusus pembayaran bantuan bagi peserta PKH dilokasi baru dilakukan setelah ada surat penetapan dari Pejabat Berwenang. Jadwal pembayaran dan pelaksanaan pembayaran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan sesuai kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan. Sedangkan untuk pembayaran bantuan tahap berikutnya, dapat tetap dilaksanakan walaupun proses verifikasi belum dilaksanakan secara optimal.

2. Implementasi PKH dalam Bidang Pendidikan

Usia tujuh tahun sampai delapan belas tahun merupakan usia penting dalam mengenyam pendidikan, dengan usia tersebut di wajib kan kepada setiap anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar mulai dari tingkat SD, SMP / SLTP dan SMA / SLTA. Adapun syaratnya yaitu harus terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan dan kehadiran di kelas minimal 85%. Rendahnya pendapatan pada keluarga

berpenghasilan rendah menyebabkan keluarga miskin tidak mampu untuk memenuhi biaya pendidikan, sehingga sekarang ini banyak anak usia sekolah tidak dapat bersekolah dan terpaksa ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat miskin karena di akibatkan kondisi ekonomi tidak bisa membayar biaya pendidikan yang mahal. Dengan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan derajat pendidikan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah selalu berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan khususnya memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal.

Salah satu pelayanan sosial yang di berikan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu salah satu kebijakannya tentang membantu pendidikan masyarakat miskin. Dengan PKH tersebut pemerintah berharap tidak ada lagi anak – anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pemerintah juga berharap anak – anak yang cerdas dan berprestasi karena Negara Indonesia membutuhkan anak – anak tersebut untuk di masa depan yang bisa membuat Negara ini menjadi lebih baik lagi. Kriteria komponen penerima PKH dalam bidang pendidikan terdiri dari, a. Anak sekolah dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat. b. Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat. c. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat. d. Anak usia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Tabel 8. Penerima PKH dalam Bidang Pendidikan

No.	Nama Anak	Nama Ibu	Sekolah	Jumlah Uang yang Diterima	Tahun Menerima
1	Aldo Nanda Prasetyo	Siti Marya	Kelas 10 SMAN 12 Bandar Lampung	Rp. 725.000	2020
2	Irtiqfa Aljaulana	Nopriyani	Kelas 9 SMPN 21 Bandar Lampung	Rp. 1.100.000	2021
3	Raisa	Juini	Kelas 1 SDN 1 Way Dadi	Rp. 450.000	2021
4	Depriansyah	Maisaroh	Kelas 10 SMAN 12 Bandar Lampung	Rp. 1.100.000	2021

3. Tingkat Keberhasilan PKH di Kelurahan Way Dadi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy (dalam Leo Agustino, 2014:154-156):

1. Content of Policy menurut Grindle adalah:

- a) Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana

kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

- b) Type of Benefits (tipe manfaat)
Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c) Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d) Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e) Program Implementer (pelaksana program)
Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f) Resources Committed (sumber-sumberdaya yang digunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy menurut Grindle adalah:

- a) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para

- aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b) Institution dan Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya.
 - c) Compliance and Responsivisness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Tabel 7. Analisis Hasil Penelitian

DIMENSI	INDIKATOR	HASIL PENELITIAN	KETERANGAN
	Kepentingan yang mempengaruhi	Didalam kepentingan yang mempengaruhi terdapat beberapa pelaksanaan seperti pelaksanaan pendataan, penetapan dan penyerahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada masyarakat yang kurang mampu.	Belum terimplementasi dengan baik
	Tipe manfaat yang diperoleh	Tipe manfaat yang diperoleh khususnya bagi penerima bantuan program PKH	Terimplementasi dengan baik

		<p>kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk masyarakat miskin kurang mampu, dampaknya sudah cukup baik dan membantu masyarakat dalam segi pelayanan sosial dan pendidikan.</p>	
<p>Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)</p>	<p>Derajat perubahan yang diinginkan</p>	<p>Terkait derajat perubahan yang diinginkan diharapkan masyarakat yang menerima bantuan dari kartu Indonesia sehat bagi yang kurang mampu bisa memanfaatkan sebaik mungkin bantuan tersebut. Sehingga dengan terciptanya hidup sehat maka akan memberikan semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diharapkan bisa mengubah status keluarga.</p>	<p>Terimplementasi dengan baik</p>

	<p>Letak pengambilan keputusan</p>	<p>Kepala seksi kesejahteraan sosial tidak terlalu serius memikirkan dampak dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan data tidak akurat dikarenakan data lama. Namun masih ada usaha yang dilakukan dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki data lama dengan turun langsung kelapangan guna memastikan tepatnya sasaran dari kebijakan kartu Indonesia sehat yang akan dimulai pada tahun 2019 ini.</p>	<p>Belum terimplementasi dengan baik</p>
	<p>Pelaksana program</p>	<p>Pelaksana untuk kebijakan PKH untuk penerima bantuan iuran adalah petugas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan dibantu dengan</p>	<p>Belum terimplementasi dengan baik</p>

		<p>Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang didistribusikan kepada warga melalui kelurahan dan ketua RT setempat. Namun dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai prosedur.</p>	
	<p>Sumber-sumber daya yang digunakan</p>	<p>Untuk mengenai sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Way Dadi memang sudah mencukupi, ada seksi kesejahteraan sosial. Namun yang jadi masalah petugas tersebut tidak selalu ada di kantornya. Seharusnya petugas seksi kesejahteraan sosial harus selalu ada dikantor sehingga ada keluhan dari masyarakat atau ada masyarakat yang ingin bertanya bisa</p>	<p>Belum Terimplementasi dengan baik</p>

		lebih mudah dilayani.	
Lingkungan Kebijakan (<i>Context of Policy</i>)	Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan para pelaksana dari kebijakan PKH dan kurangnya personil yang turun langsung kelapangan untuk mendata masyarakat kurang mampu.	Belum terimplementasi dengan baik
	Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa	Karakteristik lembaga dan penguasa pada Kelurahan Way Dadi telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelaksanaan kebijakan ini. Karakteristik lembaga dan penguasa tersebut selalu membangun hubungan emosional yang baik dengan para pegawai Kelurahan, selain itu juga	Terimplementasi dengan baik

		terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui penyediaan sarana penyampaian keluhan.	
	Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana	Tingkat kepatuhan para pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka dalam memberikan pelayanan kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pegawai memiliki komitmen yang tinggi dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan juga sangat disiplin dan sesuai dengan alur pelayanan yang sudah ditentukan.	Terimplementasi dengan baik

		Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tidak pernah membedakan antara masyarakat lain dengan satunya dalam memberikan pelayanan.	
--	--	--	--

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung

Faktor pendukung program PKH adalah dukungan finansial yang terus mengalir pada saat pencairan dan mencukupi sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses pembayaran atau pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. Hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH bapak budi, mengatakan bahwa peserta yang mempunyai anak bayi, balita juga anak pra sekolah (apras) ibunya wajib membawa anak-anaknya keposyandu. Jadi, selama dia masih menjadi peserta PKH dia tetap membawa anaknya keposyandu. Selanjutnya ibu hamil, dia harus terdata dan juga harus selalu keposyandu, selama masih menjadi peserta PKH dia harus memenuhi komitmen jadi peserta yang terdaftar di posyandu. Kemudian anak sekolah SD, SMP, SMA, jadi selama itu masyarakat berpartisipasi untuk memberi motivasi kepada anaknya agar giat pergi sekolah setiap hari termasuk kerapian, atribut dan sebagainya selama dia menjadi peserta PKH.⁵²

Hasil wawancara dengan penerima PKH ibu maisaroh yang mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang protes kenapa kami tidak mendapatkan bantuan PKH, masyarakat

⁵² Bapak Budi, Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, tanggal 10 januari 2022

mengira setiap penerima bantuan Program Keluarga Harapan, pihak pendamping PKH yang mendata masyarakat, kenapa bisa demikian pertama data yang diberi dari pusat tidak sesuai seperti yang di lapangan artinya menurut sebagian masyarakat ada yang mendapat PKH itu orang mampu sedangkan orang yang kurang mampu tidak dapat. Jadi, ada yang komplin kepada stakeholder bahwasanya datanya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan maksudnya tidak tepat sasaran. Kedua, karena saat pertama penerima PKH tidak banyak hanya 15% yang ada di Kecamatan. Karena itu banyak masyarakat yang protes, jadi kami hanya mencoba jelaskan kepada masyarakat bagaimana data itu bisa ada sama kami, jadi dengan adanya penjelasan dari kami sehingga masyarakat tahu darimana proses data ini ada.⁵³

Adapun hasil dari wawancara di atas menerangkan bahwa faktor pendukung implementasi program PKH ialah masyarakat yang patuh akan aturan program PKH sehingga sangat mendukung para pendamping dalam mendampingi masyarakat. Kemudian masyarakat juga mau berpartisipasi dengan mematuhi segala komitmen sebagai peserta PKH. Selain itu, faktor pendukung pelaksanaan program adalah dukungan finansial yang lancar sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses pembayaran atau pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu pendanaan menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam pendanaannya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu dengan anggaran yang cukup, pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup KPM sebagai tujuan program dapat meningkat. Faktor yang mendukung proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Way Dadi, sebagai berikut:

⁵³ Maisaroh penerima PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, tanggal 10 januari 2022

- a. Adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengsucceskan program keluarga harapan (PKH) guna membantu memutus rantai kemiskinan di tingkat masyarakat miskin.
- b. Adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program dan adanya jaminan memperoleh kesehatan dan pendidikan yang layak dari pemerintah melalui dinas sosial.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH ini yaitu kurang pahamnya KPM terhadap aturan bagaimana mekanisme program yang terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan komplek yang dilemparkan oleh masyarakat kepada pendamping PKH, sebagian masyarakat kurang paham bagaimana peran pendamping serta kebijakan yang diajalkan oleh pemerintah dalam melaksanakan program PKH. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi, terbukti bahwa pendamping PKH di daerah tersebut hanya sekedar hadir pada saat penyaluran bantuan dan tidak melakukan kunjungan ke rumah peserta PKH untuk melakukan monitoring sehingga penggunaan bantuan PKH tidak bisa dikontrol dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lain yang menjadi penghambat menurut peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, adanya kecemburuan sosial dari mereka masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Banyak anggapan dari masyarakat bahwa ada beberapa peserta yang dipandang tidak layak menerima, karena dianggap tidak miskin. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ibu Maisaroh mengatakan bahwa faktor yang menghambat diantaranya suka ada cemburu sosial dari tetangga. Katanya kami orang mampu jadi tidak layak dapat.⁵⁴

⁵⁴ Maisaroh penerima PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, tanggal 10 januari 2022

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecemburuan sosial yang menjadi penghambat berikutnya yaitu, kesulitan membangun komunikasi dan koordinasi untuk dikordinasi oleh kelompok penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way Dadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, tidak ada pendamping PKH yang intens mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup. Karena kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrol pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH dibelanjakan di luar ketentuan yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan.
- b. Kedua lokasi tempat tinggal pendamping yang berada diluar wilayah Kelurahan Way Dadi, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus dilakukan oleh pendamping.
- c. Ketiga, sulit melakukan koordinasi di antara peserta PKH yang di koordinir dalam kelompok. Hal tersebut disebabkan tempat tinggal peserta dalam kelompok tersebut jaraknya berjauhan, sehingga informasi terlalu lama sampai ke peserta PKH, karena harus didatangi dengan “dor to dor” kerumah masing-masing penerima PKH.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Tujuan PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

PKH Way Dadi melalui kegiatan, dimana dalam program memiliki komponen yang harus saling berkaitan antara satu dengan yang lain, baik itu input, proses, output dan outcome. Dalam pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan teori dimana adanya stimulus respon antara Keluarga Penerima Manfaat dan Program.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁵⁵ PKH merupakan salah satu solusi yang dipilih pemerintah untuk mensejahterakan keluarga yang dinilai kurang mampu berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah

⁵⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Petugas PKH/pendamping PKH harus fokus pada proses penyadaran KPM agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pemerintah.
2. Kepada masyarakat, dalam menyampaikan keluhan kepada pemerintah, agar menggunakan perwakilan agar menghindari terjadinya perdebatan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurrahman Fathoni, Teknik Riset dan Perencanaan Strategis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),
- Cholid Norobuko,Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1997)
- Cholid Norobuko,Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1997)
- Dirjen Linjamsos, Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). (Padang : Kementrian Sosial RI, 2017),
- Guntur Setiawan, Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004,
- Lexsi.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya 2001) Cet. Ke-15
- Mill dan Huberman dalam Bugin (2004: 99)
- Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013,
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo, Jakarta, 2002,
- Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi, (Malang- Rineka Cipta, 2005)
- Oos M.Anvas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991,
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Suharsimi arikunto, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek* (Jakarta : Rineka Cipta 1989),

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (yogyakarta: fakultas Psikologi UGM, 1994),

Sutrisno Hadi, *Riset Sistematis, Volume II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000),

Syarifuddin Nurdin, Basyiruddin Usman, *Guru profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta Ciputat Pers, 2002)

Sumber Jurnal

Administrative Reform, Vol.2 No.4, Desember 2014),

Agustinus Lejiu, Masjaya, Bambang Irawan. *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)*. (*Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.4, Desember 2014),.

Agustinus Lejiu, Masjaya, Bambang Irawan. *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)*. *Jurnal*

Bellone. Carl J. 2001. "Organization Theory and The New Public Administration". Allyn and Bacon, Inc. Jakarta : Gramedia.

Farizal Fetrianto. *Penerapan Formative Summative Evaluation Model Dalam Penelitian*

Farizal Fetrianto. *Penerapan Formative Summative Evaluation Model Dalam Penelitian Tindakan*. (Universitas Negeri Malang : Malang, 2017),

Farizal Fetrianto. *Penerapan Formative Summative Evaluation Model Dalam Penelitian Tindakan*. (Universitas Negeri Malang : Malang, 2017), .

Farizal Fetrianto. *Penerapan Formative Summative Evaluation Model Dalam Penelitian Tindakan*. (Universitas Negeri Malang : Malang, 2017),

Farizal Fetrianto. Penerapan *Formative Summative Evaluation Model Dalam Penelitian Tindakan*. (Universitas Negeri Malang : Malang, 2017),

Handoko, T. Hani. 2003. "Manajemen". Yogyakarta, Penerbit : BPFE.

PKH Kelurahan Way Dadi, Observasi 8 Juli 2018 Slamet Riyadi, Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin Penerima Bantuan, Tesis (Lampung: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016). Sumber: [digilib.unila.ac.id/22515/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/22515/3/TESIS_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf) diakses pada tanggal 6 Juni 2018.

Reduced by KUBE Access, Lampung Public Service, 14 September 2019,

Triwulandari, Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung. (Lampung: Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Sumber Wawancara

Budi, Pendamping PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, 10 januari 2022

Maisaroh penerima PKH Kelurahan Way Dadi, Wawancara, tanggal 10 januari 2022

Nopriyani, penerima PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, tanggal 10 januari 2022

Siti Marya, penerima PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, tanggal 09 januari 2022

Juini, penerima PKH Kelurahan Way Dadi, Observasi, tanggal 10 januari 2022

Sumber Online

Edi Suharto. “Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat”. (On-line), tersedia di : http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm (09 januari 2022)

<https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomipembangunan/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan> diakses tanggal 10 Januari 2022

<https://www.kemsos.go.id/modules> , Mari Kita Mengetahui Program PKH. Sumber wacana: Dwi Heru

<https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 10 januari 2022

Indra Bastian. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.(Erlangga:Jakarta, 2005),

Juini, Peserta PKH Kelurahan Way Dadi, wawancara, tanggal 10 Januari 2022

Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan (pasal 2 angka 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan)

Mengapa PKH Diperlukan “online”

Pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Sukoco diakses tanggal 10 januari 2022